

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Di tahun 2000-an berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan pemerintah baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada masyarakat. *E-Government* merupakan urat nadi pemerintahan. Meskipun masih relatif muda, namun tidak sedikit uang rakyat digunakan bagi pengembangan teknologi informasi bagi operasionalisasi pemerintahan dan pelayanan umum. Namun demikian, *E-Government* belum menunjukkan manfaat yang signifikan bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang terbaik. Pulau-pulau *E-Government* terbentuk dalam NKRI dan memperlebar jurang integrasi database nasional.

Otonomi daerah melahirkan persepsi & komitmen yang sangat bervariasi dalam pengembangan *E-Government* daerah dan nasional. Kondisi ini menciptakan kesadaran bahwa dalam pengembangan *e-government*, panji-panji otonomi tetap harus berjalan pada koridor nasional.

Hingga tahun 2011, pemanfaatan *e-Government* sebagai bentuk baru '*Government*' dirasakan belum maksimal. Proses bisnis yang mestinya bisa diefektifkan melalui fungsi TIK, belum diorganisasikan melalui suatu *Business Process Re-engineering* (BPR) yang baik. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan, meskipun kita sudah merdeka selama 66 tahun, meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah memanfaatkan TIK dengan nilai tidak murah, proses bisnis layanan kependudukan (KK, Akta Kelahiran, KTP, dan lain lain) hampir tidak berubah sejak mulai kita merdeka. Untuk mengurus KTP, seseorang harus mengurus berjenjang (verifikasi data) dari RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan, meskipun database-nya sudah ada. Database penduduk dan warga negara ini belum dapat dimanfaatkan oleh sistem informasi lain, seperti SI Pendidikan, SI Kesehatan, SI Pemilu, SI Kepegawaian, SI keimigrasian, dan lain lain.

Pemerintah pada tingkat desa/kelurahan belum memberlakukan *E-Government*, sehingga integrasi data pada pemerintah tingkat desa dengan pemerintah yang di atasnya yakni pemerintah tingkat kecamatan masih belum sinkron. Oleh karena itu, pemerintah tingkat desa/kelurahan dalam membuat laporan yang berhubungan dengan segala informasi

kependudukan masih dilakukan dengan cara manual. Cara manual yang dimaksud adalah masih membutuhkan alur birokrasi yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang kurang efektif dan efisien. Selain itu informasi data kependudukan yang disajikan oleh pemerintah tingkat desa masih berupa data-data *hard copy*(berbentuk kertas), sehingga informasi yang diberikan kurang *up to date*.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu perangkat lunak untuk membantu mengolah data-data mengenai kependudukan dengan menggunakan komputer dan database. Sehingga memudahkan dalam mengolah data seperti mempermudah *searching* data-data penduduk dan menghemat tempat penyimpanan yang selama ini menggunakan lemari untuk menyimpan arsip-arsip tersebut.

## **1.3. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup permasalahan dalam merancang Aplikasi Pengolahan Data Kependudukan Di Ds. Tlahab Kidul, Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, Prop. Jawa Tengah:

1. Aplikasi yang akan dibuat ditanam pada sebuah komputer yang disebut dengan *server*, kemudian aplikasi tersebut dapat diakses oleh semua petugas yang ada di kantor kelurahan menggunakan jaringan lokal atau yang sering disebut dengan *LAN*.
2. Aplikasi yang akan dibuat akan menyimpan dan merekap data kelahiran penduduk, mutasi penduduk, dan penduduk yang sudah meninggal.
3. Aplikasi yang akan dibuat memiliki fasilitas untuk membuat Surat keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak mampu, Surat Pengantar pembuatan KTP, Surat Pengantar Nikah, Surat Perpindahan Penduduk, Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Meninggal.
4. Aplikasi yang akan dibuat dapat menyajikan beberapa laporan, antara lain sebagai berikut :
  - Laporan kelahiran penduduk.
  - Laporan kematian penduduk.
  - Laporan mutasi penduduk
  - Grafik jumlah penduduk keseluruhan maupun perkategori yang dapat berdasarkan usia, pendidikan, status hubungan, kemampuan ekonomi, penduduk yang baru datang maupun penduduk yang pindah.

#### **1.4. TUJUAN**

Penelitian ini bertujuan membuat aplikasi untuk memudahkan Staff/pegawai dalam memasukkan data-data penduduk, mencari data-data serta menghasilkan laporan-laporan yang di hasilkan untuk pengarsipan di desa/kelurahan. Menggantikan cara manual yang selama ini di gunakan dalam desa/kelurahan ini sehingga lebih mudah dan efisien waktu. Aplikasi ini juga berguna untuk meningkatkan pelayanan desa/kelurahan terhadap publik.